

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENETAPAN PERUBAHAN DATA ORANG TUA PADA AKTA KELAHIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR)

**Oleh
Reza Ali**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akta kelahiran sebagai akta autentik yang memberikan kepastian hukum atas status keperdataan seseorang. Namun dalam faktanya, seringkali terjadi ketidaksesuaian data dalam akta kelahiran akibat praktik pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang sah. Hal ini terlihat pada Putusan Nomor 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr. Pemohon dalam perkara ini secara administratif tercatat sebagai anak sah dari paman dan bibinya sendiri. Berdasarkan fakta biologis, pemohon merupakan anak luar kawin dari ibu kandung yang sebenarnya. Atas dasar tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memperbaiki asal-usul nasab dan memulihkan hak keperdataannya melalui perubahan data orang tua pada akta kelahiran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran, pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, serta akibat hukum terhadap status keperdataan pemohon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan analisa data secara kualitatif, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan hukum penetapan perubahan data orang tua pada akta kelahiran memiliki legitimasi yuridis yang sah dan kuat. Hal ini didasarkan pada Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dengan adanya penetapan pengadilan negeri. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara didasarkan pada alat bukti surat, keterangan saksi, serta keyakinan hakim yang menilai adanya kesesuaian antara fakta biologis dengan permohonan yang diajukan. Akibat hukum terhadap status keperdataan pemohon ialah berubahnya status keperdataan pemohon menjadi anak luar kawin dari ibu kandungnya, timbul hubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari garis ibu, serta memberikan kepastian hukum administratif melalui Pencatatan Sipil.

Kata kunci: Akta Kelahiran, Perubahan Data Orang Tua, Penetapan Pengadilan

ABSTRACT**JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DETERMINATIONS ON PARENTAL DATA AMENDMENTS IN BIRTH CERTIFICATES (CASE STUDY OF DECISION NO. 472/PDT.P/2024/PN JKT.UTR)**

By
Reza Ali

This research is motivated by the significance of birth certificates as authentic documents that provide legal certainty regarding a person's civil status. In practice, however, discrepancies in birth certificate data often occur due to child adoption conducted without lawful procedures. Such circumstances are evident in Decision No. 472/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, where the petitioner was administratively recorded as the legitimate child of his uncle and aunt, while biologically he was the illegitimate child of his biological mother. On this basis, the petitioner submitted an application to the North Jakarta District Court to correct lineage and restore his civil rights through the amendment of parental data on the birth certificate.

This study aims to analyze the legal standing of court rulings on amendments to parental data in birth certificates, the judicial considerations underlying such decisions, and the legal consequences for the petitioner's civil status. The research employs normative legal methods with a descriptive approach, utilizing statutory and case approaches. The data consist of secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature and document studies. The data were analyzed qualitatively to produce systematic conclusions aligned with the research problem.

The findings demonstrate that the legal standing of court rulings on amendments to parental data in birth certificates possesses valid and strong juridical legitimacy. This is based on Article 56 paragraph (1) of the Population Administration Law, which stipulates that the recording of other vital events requires a district court ruling. Judicial considerations in this case were grounded in documentary evidence, witness testimony, and the judge's conviction regarding the consistency between biological facts and the petition submitted. The legal consequences include the alteration of the petitioner's civil status to that of an illegitimate child of his biological mother, the establishment of legal relations with the mother and her maternal family, and the provision of administrative legal certainty through civil registration.

Keywords: Birth Certificate, Amendment of Parental Data, Court Determination